



LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA. 018 SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018



*Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018*



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Medan, 22 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,



DR. Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko, MS
NIP. 19591226 198303 1 002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN**

JL. ASRAMA NO. 124 MEDAN, KEL. CINTA DAMAI KEC. MEDAN HELVETIA (20126)
TELP. (061) 8470504, 8458008, 8466787 FAX. (061) 8466771, 8445774
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpmedan/>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 22 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,



DR. Ir. Dwi Praptomo Sudjarmiko, MS
NIP. 19591226 198303 1 002

- Kata Pengantar
- Pernyataan Tanggung Jawab
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- Ringkasan
- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1 Pendapatan
 - B.2. Belanja Pegawai
 - B.3. Belanja Barang
 - B.4. Belanja Modal
 - B.4.1 Belanja Modal Tanah
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1 Aset Lancar
 - C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.1.2 Persediaan
 - C.2 Aset Tetap
 - C.2.1 Tanah
 - C.2.2 Peralatan dan Mesin
 - C.2.3 Gedung dan Bangunan
 - C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5 Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3 Aset Lainnya
 - C.3.1 Aset Tak Berwujud
 - C.3.2 Aset Lain-lain
 - C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Uang Muka dari KPPN
- C.5. Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortasi
 - D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Lain-Lain
 - E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3 Penyesuain Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antas Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.6 Ekuitas Akhir

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.610.047.557 atau mencapai 111,03% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.450.100.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp38.728.253.161,00 atau mencapai 92,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp42.055.763.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.796.185.064,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.129.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp55.535.432.309,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp251.623.755,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39.389.402,00 dan Rp55.756.795.662,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.555.499.312, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp36.214.928.329,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-34.659.429.017,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-34.659.429.017,00 dan Defisit Rp52.879.999,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-34.605.292.547,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp28.110.326.493,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-34.605.292.547,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp25.133.556.112,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp37.118.205.604,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp55.756.795.662,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	31 Desember 2018			31 Desember 2017
	Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.450.100.000,00	1.610.047.557,00	111,03	1.281.238.510,00
Jumlah Pendapatan	1.275.100.000,00	0,00	0,00	1.281.238.510,00
BELANJA				
Belanja Pegawai	16.532.434.000,00	15.324.639.140,00	92,69	15.513.366.226,00
Belanja Barang	18.894.904.000,00	16.957.522.721,00	89,75	7.837.871.521,00
Belanja Modal	6.628.425.000,00	6.446.091.300,00	97,25	337.443.620,00
Jumlah Belanja	42.055.763.000,00	38.728.253.161,00	92,09	23.688.681.367,00

II. NERACA

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
MEDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET		
Aset Lancar		
Persediaan	9.129.000,00	11.170.500,00
Jumlah Aset Lancar	9.129.000,00	11.170.500,00
Aset Tetap		
Tanah	24.800.092.870,00	3.561.955.299,00
Peralatan dan Mesin	38.899.362.455,00	37.377.813.425,00
Gedung dan Bangunan	23.308.385.400,00	21.027.859.350,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	397.894.000,00	1.053.526.280,00
Aset Tetap Lainnya	626.403.400,00	626.403.400,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-31.962.179.704,00	-28.932.994.585,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-470.180.354,00	-6.003.317.339,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-64.345.758,00	-744.654.837,00
Jumlah Aset Tetap	55.535.432.309,00	27.966.590.993,00
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	134.320.600,00	134.320.600,00
Aset Lain-lain	243.321.980,00	25.065.480,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-124.263.225,00	-25.065.480,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-1.755.600,00	-1.755.600,00
Jumlah Aset Lainnya	251.623.755,00	132.565.000,00
Jumlah Aset	55.796.185.064,00	28.110.326.493,00
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Kepada Pihak Ketiga	39.389.402	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39.389.402	
Jumlah Kewajiban	39.389.402	
Ekuitas		
Ekuitas	55.796.185.064,00	28.110.326.493,00
Jumlah Ekuitas	55.796.185.064,00	28.110.326.493,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	55.796.185.064,00	28.110.326.493,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.555.499.312,00	1.281.237.587,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.555.499.312,00	1.281.237.587,00
BEBAN		
Beban Pegawai	15.324.639.140,00	15.513.366.226,00
Beban Persediaan	463.576.402,00	312.088.980,00
Beban Barang dan Jasa	5.548.677.953,00	3.490.228.489,00
Beban Pemeliharaan	1.828.858.925,00	1.343.732.195,00
Beban Perjalanan Dinas	5.103.294.181,00	2.763.525.357,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.098.018.985,00	30.360.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.808.473.341,00	3.451.594.339,00
JUMLAH BEBAN	36.214.928.329,00	26.904.895.586,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-34.659.429.017,00	-25.623.657.999,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	52.879.999,00	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	52.879.999,00	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.668.246,00	1.252.923,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	411.775,00	0,00
Jumlah Surplus/(deficit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.256.471	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	54.136,470	1.252.923,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	-34.605.292.547,00	-25.622.405.076,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	28.110.326.493,00	31.311.008.712,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	-34.605.292.547,00	-25.622.405.076,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	25.133.556.112,00	14.280.000,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
Koreksi Lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	839.421.713,00	14.280.000,00
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	24.294.134.399,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	37.118.205.604,00	22.407.442.857,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	27.646.469.169	-3.200.682.219
EKUITAS AKHIR	55.756.795.662,00	28.110.326.493,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan perkebunan yang berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.450.100.000,00	1.450.100.000,00
Jumlah Pendapatan	1.450.100.000,00	1.450.100.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	16.532.434.000,00	16.532.434.000,00
Belanja Barang	18.343.554.000,00	18.894.904.000,00
Belanja Modal	6.628.425.000,00	6.628.425.000,00
Jumlah Belanja	41.504.413.000,00	42.055.763.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.610.047.557 atau mencapai 111,03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.450.100.000,00. Terdapat jasa layanan umum sebesar 1.275.100.000 tidak direalisasikan. Anggaran tersebut tidak direalisasikan karena tidak sesuai dengan yang diusulkan di DIPA, akun tersebut merupakan akun untuk satker badan layanan umum sedangkan satker BBPPTP MEDAN merupakan bukan satker Badan Layanan Umum. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	175.000.000	74.014.999	42,29
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	650.678.655	0,00
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	0,00	840.229.297	0,00
Pendapatan Denda	0,00	43.456.360	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	1.668.246	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.275.100.000	0,00	0,00
Jumlah	1.450.100.000	1.610.047.557	111,03

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,25% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	74.014.999,00	3.570.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	650.678.655,00	1.277.667.587,00
Pendapatan Lain-lain	1.668.246,00	923,00
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	840.229.297	0,00
Pendapatan Denda	43.456.360	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00
Jumlah	1.610.047.557,00	1.281.238.510,00

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp38.728.253.161,00 atau 92,09% dari anggaran belanja sebesar Rp42.055.763.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		16.532.434.000,00	15.325.751.153,00	92,70
Belanja Barang		18.894.904.000,00	16.958.724.321,00	89,75
Belanja Modal		6.628.425.000,00	6.446.091.300,00	97,25
Total Belanja Kotor		42.055.763.000,00	38.730.566.774,00	92,09
Pengembalian Belanja			-2.313.613,00	0,00
Total Belanja		42.055.763.000,00	38.728.253.161,00	92,09

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 63,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan terhadap anggaran belanja di Tahun 2018

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	15.324.639.140,00	15.513.366.226,00	-1,22

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Barang	16.957.522.721,00	7.837.871.521,00	116,35
Belanja Modal	6.446.091.300,00	337.443.620,00	1.810,27
Total Belanja	38.728.253.161,00	23.688.681.367,00	63,49

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.324.639.140,00 dan Rp15.513.366.226,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -1,22% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Jumlah pegawai yang pensiun mempengaruhi penurunan realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	15.176.363.153,00	15.364.092.346,00	-1,22
Belanja Lembur	149.388.000,00	149.276.000,00	0,08
Jumlah Belanja Kotor	15.325.751.153,00	15.513.368.346,00	-1,21
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.313.613,00	-2.120,00	109.032,70
Jumlah Belanja	15.324.639.140,00	15.513.366.226,00	-1,22

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.957.522.721,00 dan Rp7.837.871.521,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 116,35% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Peningkatan anggaran belanja barang pada tahun anggaran 2018.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.921.186.825,00	1.322.600.075,00	45,26
Belanja Barang Non Operasional	2.039.957.923,00	1.034.778.915,00	97,14

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Persediaan	512.007.802,00	252.410.275,00	102,85
Belanja Jasa	1.504.259.205,00	1.132.849.499,00	32,79
Belanja Pemeliharaan	1.778.797.800,00	1.301.347.400,00	36,69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.104.495.781,00	2.763.525.357,00	84,71
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	4.098.018.985,00	30.360.000,00	13.398,09
Jumlah Belanja Kotor	16.958.724.321,00	7.837.871.521,00	116,37
Pengembalian Belanja Barang	-1.201.600,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	16.957.522.721,00	7.837.871.521,00	116,35

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.446.091.300,00 dan Rp337.443.620,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.810,27% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Peningkatan anggaran belanja modal dalam beberapa kegiatan yang cukup signifikan menyebabkan kenaikan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	199.140.870,00	337.443.620,00	-40,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.604.823.030,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.642.127.400,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	6.446.091.300,00	337.443.620,00	1.810,27
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.446.091.300,00	337.443.620,00	1.810,27

B.4.1 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp199.140.870,00 dan Rp337.443.620,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 mengalami penurunan sebesar -40,99% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran belanja modal tanah di tahun 2018.

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	199.140.870,00	337.443.620,00	-40,99
Jumlah Belanja Kotor	199.140.870,00	337.443.620,00	-40,99
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	199.140.870,00	337.443.620,00	-40,99

B.4.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.604.823.030,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan anggaran belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2018.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.604.823.030,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.604.823.030,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.604.823.030,00	0,00	0,00

B.4.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.642.127.400,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan belanja modal gedung dan bangunan di tahun anggaran 2018.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.642.127.400,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	4.642.127.400,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.642.127.400,00	0,00	0,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.129.000,00 dan Rp11.170.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	9.129.000,00	11.170.500,00
Jumlah	9.129.000,00	11.170.500,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.800.092.870,00 dan Rp3.561.955.299,00. Total Sebanyak 13 Aset Tanah yang di Sertifikatkan di tahun 2018 dengan status SKT/Menunggu Sertifikat diterbitkan.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018

No	Lokasi				Luas	Progress
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jalan		
1	Langkat	Selesai	Air Hitam	Jalan S Parman Dusun V	1.500 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
		Besitang	Pekan Besitang	Jalan Kepati Buaya	1.492 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
2	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	Mangga Dua	Jalan Desa Mangga dua Dusun I	2.646 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
		Tanjung Beringin	Mangga Dua	Jalan Desa Mangga dua Dusun I	1.862 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
3	Tanjung Balai	Datuk Bandar	Sungai Dua Hulu	Jalan Desa Sungai Dua Hulu	1.200 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
		Datuk Bandar	Sijambi	Jalan Pasar Traktor	1.200 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
4	Tapanuli Utara	Pahae Jae	Simangumban Julu	Jalan Lintas Tarutung-Sipirok	990 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
		Pahae Jae	Simangumban Jae	Jalan Desa Simangumban Jae	1.020 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
		Siborong Borong	Pohan Tonga	Jalan Lintas Balige-Siborongborong	2.000 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat

		Adian Koting	Sibalanga	Jalan Desa Sibalanga	20.000 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
5	Padang Lawas	Sosopan	Sosopan	Jalan Desa Sosopan	750 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
6	Padang Lawas Utara	Dolok	Dalihan Natolu	Jalan Lintas Hiteuret-Sipiongot	2.000 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat
7	Tapanuli Tengah	Pinang Sori	Pinang Sori	Jalan Desa Pinang Sori	1.000 M ²	SKT/Menunggu Sertifikat

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.899.362.455,00 dan Rp37.377.813.425,00.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp23.308.385.400,00 dan Rp21.027.859.350,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp397.894.000,00 dan Rp1.053.526.280,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp626.403.400,00 dan Rp626.403.400,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-32.496.705.816,00 dan Rp-35.680.966.761,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	38.899.362.455,00	-31.962.179.704,00	6.937.182.751,00
2.	Gedung dan Bangunan	23.308.385.400,00	-470.180.354,00	22.838.205.046,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	397.894.000,00	-64.345.758,00	333.548.242,00
4.	Aset Tetap Lainnya	626.403.400,00	0,00	626.403.400,00
Akumulasi Penyusutan		63.232.045.255,00	-32.496.705.816,00	30.735.339.439,00

C.4 ASET LAINNYA

C.4.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp134.320.600,00 dan Rp134.320.600,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	132.565.000,00
Software	1.755.600,00
Jumlah	134.320.600,00

C.4.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp243.321.980,00 dan Rp25.065.480,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-126.018.825,00 dan Rp-26.821.080,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	134.320.600,00	-1.755.600,00	132.565.000,00
2.	Aset Lain-lain	243.321.980,00	-124.263.225,00	119.058.755,00
Akumulasi Penyusutan		377.642.580,00	-126.018.825,00	251.623.755,00

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp55.756.795.662,00 dan Rp28.110.326.493,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.610.047.557,00 dan Rp1.281.237.587,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	74.014.999,00	3.570.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	650.678.655,00	1.277.667.587,00
Pendapatan Lain-lain	1.668.246,00	923,00
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	840.229.297	0,00
Pendapatan Denda	43.456.360	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00
Jumlah	1.610.047.557,00	1.281.238.510,00

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.324.639.140,00 dan Rp15.324.639.140,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	10.766.432.380,00	11.020.284.800,00	-2,30
Beban Pembulatan Gaji PNS	130.347,00	124.832,00	4,42
Beban Tunj. Anak PNS	229.873.564,00	220.547.832,00	4,23
Beban Tunj. Beras PNS	549.016.020,00	574.869.960,00	-4,50
Beban Tunj. Fungsional PNS	699.510.000,00	658.055.000,00	6,30

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Tunj. PPh PNS	9.741.519,00	7.494.572,00	29,98
Beban Tunj. Struktural PNS	65.240.000,00	68.680.000,00	-5,01
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	769.619.310,00	739.639.230,00	4,05
Beban Tunjangan Umum PNS	397.590.000,00	386.290.000,00	2,93
Beban Uang Lembur	149.388.000,00	149.276.000,00	0,08
Beban Uang Makan PNS	1.688.098.000,00	1.688.104.000,00	0,00
Jumlah	15.324.639.140,00	15.513.366.226,00	-1,22

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp463.576.402,00 dan Rp312.088.980,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	108.701.466,00	36.451.230,00	198,21
Beban Persediaan konsumsi	354.874.936,00	275.537.750,00	28,79
Beban persediaan lainnya	0,00	100.000,00	-100,00
Jumlah	463.576.402,00	312.088.980,00	48,54

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.548.677.953,00 dan Rp3.490.228.489,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	83.274.000,00	0,00	0,00
Beban Bahan	408.597.410,00	489.668.015,00	-16,56
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.299.560.513,00	352.810.900,00	268,35
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	253.180.000,00	199.420.000,00	26,96
Beban Honor Output Kegiatan	331.800.000,00	192.300.000,00	72,54
Beban Jasa Lainnya	992.000.000,00	621.540.000,00	59,60
Beban Jasa Profesi	76.200.000,00	111.800.000,00	-31,84
Beban Keperluan Perkantoran	1.518.984.825,00	1.013.500.375,00	49,88
Beban Langganan Air	39.182.230,00	20.638.220,00	89,85
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30.955.955,00	31.375.750,00	-1,34
Beban Langganan Listrik	337.240.574,00	327.039.124,00	3,12
Beban Langganan Telepon	22.830.446,00	15.456.405,00	47,71
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	123.112.800,00	97.680.000,00	26,04
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25.909.200,00	11.999.700,00	115,92
Beban Sewa	5.850.000,00	5.000.000,00	17,00
Jumlah	5.548.677.953,00	3.490.228.489,00	58,98

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.828.858.925,00 dan Rp1.343.732.195,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	929.869.200,00	461.445.900,00	101,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	848.928.600,00	839.901.500,00	1,08

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	27.827.795,00	6.787.750,00	309,97
Beban Persediaan suku cadang	22.233.330,00	35.597.045,00	-37,54
Jumlah	1.828.858.925,00	1.343.732.195,00	36,10

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.103.294.181,00 dan Rp2.763.525.357,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	4.314.381.295,00	2.571.695.057,00	67,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.750.000,00	56.870.000,00	59,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	474.127.836,00	22.300.000,00	2.026,13
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	224.035.050,00	112.660.300,00	98,86
Jumlah	5.103.294.181,00	2.763.525.357,00	84,67

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.098.018.985,00 dan Rp30.360.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.254.450.000,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	310.072.485,00	0,00	0,00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	533.496.500,00	30.360.000,00	1.657,24
Jumlah	4.098.018.985,00	30.360.000,00	13.398,09

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.808.473.341,00 dan Rp3.451.594.339,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	715.007.391,00	460.286.698,00	55,34
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.027.584,00	32.722.668,00	65,11
Beban Penyusutan Jaringan	6.180.363,00	6.183.801,00	-0,06
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.072.884,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.029.185.119,00	2.952.401.172,00	2,60
Jumlah	3.808.473.341,00	3.451.594.339,00	10,34

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-411.775,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	1.252.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	923,00	-100,00
Jumlah	-411.775,00	1.252.923,00	-132,87

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp28.110.326.493,00 dan Rp31.311.008.712,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-34.605.292.547,00 dan Rp-25.622.405.076,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.133.556.112,00 dan Rp14.280.000,00.

E.4.1 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp839.421.713,00 dan Rp14.280.000,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.254.811.267,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	308.696.426,00
Gedung dan Bangunan	-993.477.800,00
Jalan dan Jembatan	-374.476.680,00

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	20.395.128.201,00
Gedung dan Bangunan	-1.149.867.050,00
Jalan dan Jembatan	-281.155.600,00
Jumlah	24.294.134.399,00
Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	643.868.500,00
Jumlah	839.421.713,00

E.4.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.294.134.399,00 dan Rp0,00.

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp37.118.205.604,00 dan Rp22.407.442.857,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	38.728.253.161,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.610.047.557,00
Jumlah	37.118.205.604,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.610.047.557,00 sedangkan DKEL sebesar Rp38.728.253.161,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp55.756.795.662,00 dan Rp28.110.326.493,00.



BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPT) MEDAN
Jl. Asrama No. 124 Sei Sikambing Medan (20126)
Phone: (061) 8466787, 8458008
website : www.ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpmedan